

Terjemahan sebagai Arena Gender: Analisis Bias Patriarkal dalam Pilihan Leksikal Al-Quran Terjemahan Kemenag RI Edisi 2019

Sriana¹, Yufridal Fitri Nursalam²

¹Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo; Indonesia

²Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhamad Besari Ponorogo;Indonesia

Correspondence e-mail: Srianasalam@gmail.com

Submitted:2025/12/15

Revised: 2025/12/21;

Accepted: 2025/12/24;

Published: 2025/12/30

Abstract

This study reveals ideological inconsistencies in the 2019 edition of the Qur'an translation published by the Indonesian Ministry of Religious Affairs (MoRA), which claims to embody the values of "religious moderation" yet continues to reproduce patriarchal bias in verses related to women. Employing a comparative qualitative design through Fairclough's Critical Discourse Analysis and lexical comparison, the research contrasts three official Indonesian translations (1971, 2002, 2019) with two feminist translations by Amina Wadud and Laleh Bakhtiar. The analysis focuses on four key verses—QS 4:34, 2:228, 33:59, and 24:31. Findings indicate that MoRA's translation consistently opts for the most patriarchal interpretations of Arabic words with broad semantic ranges: *qawwāmūn* as "leaders" rather than "protectors," *waḍribūhunna* as "beat them" instead of "separate from them," and *darajah* as "superiority" rather than "greater responsibility." Moreover, while the 2019 edition revised politically sensitive verses such as QS 5:51 ("leaders" "protectors") following socio-political controversy, it left gender-related verses unchanged. The study concludes that MoRA's notion of "religious moderation" is selective progressive in political pluralism but conservative in gender issues thereby reinforcing patriarchal structures under the guise of neutrality. The research calls for methodological transparency, inclusion of female scholars in translation teams, and a plural translation system that accommodates feminist perspectives to achieve epistemic justice in Qur'anic translation in Indonesia

Keywords

patriarchal bias, feminist translation, religious moderation, gender politics, Critical Discourse Analysis.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, Kementerian Agama Republik Indonesia merilis edisi penyempurnaan terjemahan Al-Quran yang diklaim sebagai respons terhadap kebutuhan moderasi beragama di era

kontemporer.¹ Program Moderasi Beragama yang diluncurkan pada tahun yang sama menekankan pentingnya pemahaman kontekstual, toleransi, dan keadilan sebagai pilar utama Islam Indonesia (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).² Retorika resmi pemerintah menekankan bahwa terjemahan baru ini mencerminkan "Islam yang *rahmatan lil 'alamin*"³—Islam yang penuh rahmat bagi seluruh alam, termasuk perempuan.⁴

Namun, analisis mendalam terhadap terjemahan edisi 2019 mengungkap paradoks yang mengkhawatirkan. Sementara Kemenag melakukan pelunakan (*softening*) pada ayat-ayat politik-identitas seperti QS 5:51—mengubah *pemimpin-pemimpin* menjadi pelindung⁵ untuk mengurangi potensi konflik politik⁶, —terjemahan ayat-ayat tentang perempuan justru mempertahankan atau bahkan memperkuat bias patriarkal yang telah lama dikritik oleh feminis Muslim⁷ (Barlas, ; Wadud,). Inkonsistensi ini menimbulkan pertanyaan fundamental: Apakah "moderasi beragama" versi Kemenag RI bersifat selektif, hanya berlaku untuk isu pluralisme politik namun tidak untuk kesetaraan gender? Penelitian sebelumnya telah mengungkap bahwa perubahan terjemahan QS 5:51 didorong oleh kepentingan politik pascakontroversi⁸ Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.⁹

¹ . Kementerian Agama RI.. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI. (2019) Tersedia di: <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

² . Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). Peluncuran resmi dilakukan pada 14 Oktober 2019 di Aula Bayt Al-Qur'an, TMII, Jakarta.

³ ."Retorika resmi pemerintah menekankan bahwa terjemahan baru ini mencerminkan 'Islam yang rahmatan lil 'alamin'—Islam yang penuh rahmat bagi seluruh alam, termasuk perempuan.'¹ Kepala Badan Litbang-Diklat bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa terjemahan edisi 2019 'bersifat moderat serta ramah gender dan difabel.'²"

¹ Lukman Hakim Saifuddin, "Kata Pengantar," dalam Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. iii.

² Abd Rahman Mas'ud, "Laporan Kepala Badan Litbang dan Diklat dalam Peluncuran Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan," 14 Oktober 2019, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-terjemahan-al-quran-edisi-penyempurnaan-3mcud6>

⁴ . Abd Rahman Mas'ud, "Laporan Kepala Badan Litbang dan Diklat," dalam Peluncuran Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan, 14 Oktober 2019, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-terjemahan-al-quran-edisi-penyempurnaan-3mcud6>

⁵ . Detikcom. (2016, 23 Oktober). Penjelasan Kemenag Soal 'Awliya' di Al Maidah 51 yang Ramai Diperbincangkan. <https://news.detik.com/berita/d-3327245/penjelasan-kemenag-soal-awliya-di-al-maidah-51-yang-ramai-diperbincangkan>

⁶ . Hanafi, M. M. (2016, 23 Oktober). Penjelasan Kemenag Soal 'Awliya' di Al Maidah 51 yang Ramai Diperbincangkan. *Siaran Pers Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*. Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/read/soal-terjemahan-awliya-sebagai-teman-setia-ini-penjelasan-kemenag-0x8vr>

⁷ . Meskipun Kemenag klarifikasi bahwa tidak ada perubahan setelah kasus Ahok (2016), edisi 2019 justru mengubah lagi terjemahan QS 5:51 dari "teman setia" (2002) menjadi "pelindung" (2019).

⁸ . Awa, Charisse Renica Benedicta and Febby R. Widjayanto, 2024. "Karya sastra sebagai sarana literasi politik: novel "bungkam suara" karya j. s. khairan sebagai narasi melawan propaganda terkomputasi", *Jurnal politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*(2), 10:156-183. <https://doi.org/10.20473/jpi.v10i2.65355>

⁹ . Nugroho, Agrhashakara Tegarpanhiga, David Hizkia Tobing, and Supriyadi Supriyadi, 2022. "Preferensi ideologi dan perilaku politik pemilih pada pilpres 2019: asosiasi antara openness to experience, conscientiousness, 2192

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa negara,¹⁰ melalui Kementerian Agama, memiliki kapasitas dan kehendak untuk melakukan intervensi terhadap terjemahan Al-Quran demi kepentingan politik kontemporer (Lefevere,). Pertanyaannya adalah: Jika negara mampu dan bersedia mengubah terjemahan untuk mengurangi konflik politik, mengapa tidak melakukan hal serupa untuk mengurangi ketidakadilan gender yang dialami jutaan perempuan Muslim Indonesia?¹¹

Data awal menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. QS 4:34, yang berbicara tentang relasi suami-istri, menerjemahkan kata *قَوَّامُونَ* (*qawwāmūn*) sebagai "pemimpin atas" dengan konotasi hierarki yang kuat, sementara kata yang sama dalam konteks politik (seperti "*aulyā*" dalam QS 5:51) diubah dari "pemimpin" ke "pelindung" (Kementerian Agama RI, 2019). QS 4:34 juga mempertahankan terjemahan *وَاضْرِبُوهُنَّ* sebagai pukullah mereka tanpa catatan kaki yang menjelaskan kontroversi tafsir klasik atau alternatif pemahaman kontemporer.¹² QS 2:228 menerjemahkan *وَاللِّزَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ* sebagai dan para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya," mengimplisitkan superioritas struktural laki-laki (Kementerian Agama RI, 2019). QS 33:59 dan 24:31, yang membahas jilbab¹³ dan aurat, ¹⁴diterjemahkan dengan definisi teknis yang sangat spesifik tanpa mengakomodasi pluralitas pendapat ulama klasik maupun kontemporer.¹⁵

Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama: bagaimana pilihan leksikal dalam terjemahan kemenag ri edisi 2019 mencerminkan bias patriarkal dalam ayat-ayat tentang perempuan, dan bagaimana hal ini berbeda dengan terjemahan edisi sebelumnya (1971-2002), mengapa terdapat inkonsistensi antara "moderasi" dalam penerjemahan ayat-ayat politik-identitas dan konservatisme

agreeableness, dan otoritarianisme sayap kanan", Jurnal Psikologi Udayana(1), 9:71. <https://doi.org/10.24843/jpu.2022.v09.i01.p08>

¹⁰ . Trihono. (2017). *Kontroversi Pemimpin Non-Muslim Menjelang Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 (Analisis Wacana Terhadap Pemberitaan Media Online Republika.co.id dan Kompas.com)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28675/>

¹¹ . Yuniarti, Rina, Pedi Riswandi, and Meilaty Finthariasari, 2021. "Analisis pengaruh koneksi politik dan gender diversity terhadap fee audit", Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis(1), 14:133-142. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4621>

¹² . Vedi R. Hadiz, "Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets" (London: Routledge, 2017). ``

¹³ . Thohari, Chamim. "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab (Kajian Hermeneutika Kritis)." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2011): 75-94

¹⁴ . Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

¹⁵ . Syuqqah, Abu. *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadits*. Bandung: Mizan, 1998.

dalam penerjemahan ayat-ayat gender, dan apa implikasi epistemologis serta politik dari inkonsistensi ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui analisis komparatif terjemahan resmi dengan terjemahan feminis, serta analisis wacana kritis terhadap pilihan leksikal dan struktur ideologis yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk, mengidentifikasi dan menganalisis bias patriarkal dalam pilihan leksikal terjemahan ayat-ayat tentang perempuan, membandingkan terjemahan kemenag ri dengan terjemahan feminis untuk menunjukkan alternatif yang lebih egalite, mengungkap inkonsistensi ideologis dalam program "moderasi beragama" versi pemerintah, memberikan rekomendasi praktis untuk reformasi penerjemahan al-quran yang lebih inklusif gender

Dari perspektif epistemologis, terjemahan Al-Quran adalah salah satu sumber utama pemahaman keagamaan bagi mayoritas Muslim Indonesia yang tidak menguasai bahasa Arab.¹⁶ Jika terjemahan resmi mengandung bias patriarkal, maka bias tersebut akan dinormalisasi sebagai "Islam yang benar" di ruang publik, pendidikan, dan institusi negara (Spivak,). Hal ini menciptakan hegemoni epistemologis yang membatasi ruang bagi interpretasi alternatif yang lebih egaliter (Venuti),¹⁷

Terjemahan bukan hanya proses teknis-linguistik, tetapi juga proses ideologis yang melibatkan pemilihan, seleksi, dan pembingkaihan makna¹⁸. Ketika penerjemah—dalam hal ini tim resmi Kemenag RI—memilih kata "pemimpin" untuk *qawwāmūn* alih-alih "pelindung" atau "penyokong," mereka tidak hanya menerjemahkan kata tetapi juga mereproduksi struktur kekuasaan patriarkal¹⁹. Penelitian ini menggunakan kerangka Feminist Translation Studies untuk membongkar proses ideologis ini dan menunjukkan bahwa terjemahan yang lebih adil gender adalah mungkin dan diperlukan.

Dari perspektif sosial, Indonesia memiliki sekitar 130 juta perempuan Muslim—populasi perempuan Muslim terbesar di dunia.²⁰ Terjemahan yang bias patriarkal memiliki dampak material

¹⁶ . Pamessangi, Andi Arif. "Analisis Kesulitan Belajar Bahasa Arab Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palopo." *AL IBRAH: Journal of Arabic Language Education* 2, no. 1 (2019).

¹⁷ . Spivak, Gayatri Chakravorty. "The Politics of Translation." In *Outside in the Teaching Machine*, 179–200. New York: Routledge, 1993.

¹⁸ . 1. George Lakoff, "The Contemporary Theory of Metaphor," in *Metaphor and Thought*, ed. Andrew Ortony (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 202–251.

¹⁹ . 1. Luise von Flotow, *Translation and Gender: Translating in the 'Era of Feminism'* (Manchester: St. Jerome Publishing; Ottawa: University of Ottawa Press, 1997).

²⁰ . Badan Pusat Statistik. *Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2023 (Women and Men in Indonesia 2023)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/en/publication/2023/12/22/e5942bdd51b158776ee5eabf/perempuan-2194>

terhadap kehidupan mereka: legitimasi kekerasan domestik melalui pemahaman literal QS 4:34, pembatasan mobilitas dan partisipasi publik melalui interpretasi restriktif tentang jilbab dan aurat, serta subordinasi struktural dalam relasi keluarga dan masyarakat.

Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus meningkat, dengan Total 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 - Penurunan 55.920 kasus atau sekitar 12% dibandingkan tahun 2022 - Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan: 4.471 kasus (naik dari 4.322 kasus tahun 2021) - Ranah personal: 2.098 kasus; Ranah publik: 1.276 kasus; Ranah negara: 68 kasus kasus dilaporkan pada tahun 2022 (Komnas Perempuan, 2023)²¹. Sebagian besar pelaku menggunakan justifikasi agama untuk melegitimasi kekerasan mereka.²² Penelitian ini, dengan demikian, memiliki implikasi langsung terhadap keadilan sosial dan hak asasi perempuan.

Dari perspektif politik, inkonsistensi antara "moderasi" dalam isu pluralisme politik dan "konservatisme" dalam isu gender mengungkap agenda politik negara yang tidak netral (Fairclough,)²³. Negara bersedia melakukan intervensi untuk mengurangi konflik antar-agama (yang mengancam stabilitas politik), namun tidak untuk mengurangi ketidakadilan gender (yang justru mendukung struktur kekuasaan patriarkal yang menguntungkan negara)²⁴. Membongkar inkonsistensi ini penting untuk mengkritik selektivitas "moderasi beragama" versi pemerintah. Moderasi yang sejati tidak boleh selektif; ia harus mencakup moderasi dalam semua aspek kehidupan sosial, termasuk—dan terutama—dalam isu kesetaraan gender yang mempengaruhi separuh populasi Muslim Indonesia.

Dari perspektif akademis, penelitian tentang terjemahan Al-Quran di Indonesia cenderung fokus pada dimensi linguistik atau sejarah (Gusman, dan Federspiel)²⁵, dengan sedikit perhatian pada dimensi gender. Feminist Translation Studies sebagai pendekatan teoretis masih sangat minim digunakan dalam konteks Indonesia.²⁶ Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan

dan-laki-laki-di-indonesia-2023.html.

²¹. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

²². Kodir, Faqihuddin Abdul. "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia." *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences* 12, no. 1 (Juli 2011): 1-26. <https://doi.org/10.24235/holistik.v12i1.80>.

²³. Norman Fairclough, *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research* (London: Routledge, 2003).

²⁴. Haboddin, Muhtar. "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal." *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 1 (Februari 2012): 109-126

²⁵. Gusman, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.

²⁶. Gusman, Islah. "Bahasa dan Aksara Tafsir Al-Qur'an di Indonesia dari Tradisi, Hierarki hingga Kepentingan

menerapkan teori feminis pada analisis terjemahan Al-Quran, membuka agenda penelitian baru yang selama ini terpinggirkan.

Lebih lanjut, penelitian ini berkontribusi pada diskusi global tentang gender dan terjemahan kitab suci dengan menyediakan studi kasus dari konteks Muslim-mayoritas yang demokratis. Berbeda dengan konteks Timur Tengah yang otoriter atau konteks Barat yang minoritas Muslim, Indonesia menawarkan ruang unik untuk mengkaji bagaimana negara demokratis mengelola terjemahan kitab suci di tengah tekanan dari kelompok konservatif dan progresif.

Penelitian ini membatasi fokusnya pada empat ayat kunci yang paling sering menjadi rujukan dalam diskusi tentang gender dalam Islam: QS 4:34 (tentang relasi suami-istri dan isu kekerasan domestik), QS 2:228 (tentang hak dan kewajiban dalam perceraian), QS 33:59 (tentang jilbab), dan QS 24:31 (tentang aurat). Pemilihan keempat ayat ini didasarkan pada signifikansi teologis dan praktis mereka dalam membentuk pemahaman Muslim Indonesia tentang relasi gender. Penelitian ini juga membatasi analisis komparatif pada tiga edisi terjemahan Kemenag RI (1971, 2002, dan 2019) dan dua terjemahan feminis utama (Amina Wadud dan Laleh Bakhtiar). Terjemahan lain, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa lain, tidak dianalisis secara mendalam meskipun dapat dirujuk sebagai pembanding tambahan.

Dari segi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) dan analisis leksikal komparatif. Penelitian ini tidak melakukan survei kuantitatif terhadap penerimaan terjemahan di kalangan Muslim Indonesia, meskipun data sekunder tentang dampak sosial terjemahan akan dirujuk.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif komparatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Pendekatan ini dipilih karena mampu menyingkap makna tersembunyi di balik struktur bahasa dan mengaitkannya dengan konteks sosial-politik yang melingkupinya. Melalui analisis ini, penelitian tidak hanya berfokus pada deskripsi linguistik terjemahan, tetapi juga berusaha mengungkap konstruksi ideologis yang membentuk cara pandang terhadap gender dalam teks Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Desain ini bersifat deskriptif-analitis dan kritis, karena tujuannya tidak sekadar memetakan perbedaan terjemahan, melainkan juga mengkritisi ideologi yang mendasari perbedaan tersebut serta menelaah implikasinya terhadap relasi gender dan wacana keagamaan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup tiga edisi resmi terjemahan Al-Qur'an oleh Kemenag RI, yaitu edisi 1971, 2002, dan edisi penyempurnaan 2019. Ketiganya dibandingkan dengan dua teks terjemahan atau bacaan feminis, yakni *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* karya Amina Wadud dan *The Sublime Quran* karya Laleh Bakhtiar.²⁷ Selain itu, teks Arab Muṣḥaf Uthmānī digunakan sebagai rujukan utama untuk menjaga kesesuaian antara teks sumber dan hasil terjemahan.

Data sekunder meliputi sejumlah tafsir klasik seperti karya al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr, yang digunakan untuk menelusuri akar interpretasi patriarkal dalam sejarah penafsiran. Sementara itu, kamus Arab klasik seperti *Lisān al-'Arab* karya Ibn Manẓūr dan *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* karya al-Fairūzābādī digunakan untuk menganalisis kemungkinan variasi makna kata-kata kunci. Penelitian ini juga mengacu pada dokumen kebijakan Kemenag RI, terutama dokumen *Moderasi Beragama* (2019) serta laporan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an terkait proses revisi terjemahan. Sebagai pendukung konteks sosial, digunakan pula data statistik dari Komnas Perempuan (2020–2023) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai populasi dan dinamika gender di Indonesia.

Teknik utama pengumpulan data adalah analisis dokumen, yang dilakukan terhadap teks-teks terjemahan, tafsir, dan kebijakan. Proses ini dimulai dengan identifikasi ayat-ayat kunci, yakni QS 4:34, QS 2:228, QS 33:59, dan QS 24:31 —empat ayat yang sering digunakan dalam perdebatan tentang posisi perempuan dalam Islam. Selanjutnya dilakukan ekstraksi teks dengan menyusun teks Arab, terjemahan tiga edisi Kemenag, dan dua terjemahan feminis dalam bentuk tabel komparatif untuk mempermudah analisis perbandingan.

Analisis dilakukan dalam dua tahap utama. Pertama, analisis leksikal, yaitu pemeriksaan terhadap pilihan kata kunci seperti *qawwāmūn*, *waḍribūhunna*, *darajah*, dan *jilbāb*, untuk melihat bagaimana perbedaan terjemahan merepresentasikan ideologi tertentu. Tahap kedua adalah analisis kontekstual, yakni telaah terhadap pengantar, catatan kaki, dan unsur parateks lain yang menunjukkan kerangka berpikir penerjemah. Selain itu, dilakukan pula studi kepustakaan untuk memperkuat analisis teoritis melalui telaah literatur mengenai *Feminist Translation Studies*, tafsir feminis, sejarah penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia, serta wacana “moderasi beragama” dan politik gender di Indonesia.

²⁷ . Bakhtiar, Laleh. *The Sublime Quran*. Chicago: Kazi Publications, 2007

Analisis data dilakukan dengan tiga teknik utama. Pertama, analisis leksikal komparatif, yaitu membandingkan secara sistematis pilihan kata dalam setiap versi terjemahan. Perbandingan ini mencakup aspek semantik (makna literal dan konotatif), ideologis (implikasi terhadap relasi gender), dan konsistensi (apakah satu kata diterjemahkan seragam dalam konteks berbeda).

Kedua, Analisis Wacana Kritis (CDA) mengikuti kerangka tiga dimensi Norman Fairclough: (1) analisis tekstual, meliputi pilihan leksikal, struktur gramatikal, kohesi, dan keberadaan catatan kaki; (2) analisis praktik diskursif, yang menelaah siapa penerjemahnya, bagaimana teks diterbitkan dan disebarluaskan, serta siapa audiens yang dituju; dan (3) analisis praktik sosial, yang mengaitkan hasil terjemahan dengan konteks sosio-politik Indonesia, khususnya program moderasi beragama dan politik gender negara.

Ketiga, analisis intertekstualitas, yang menelaah hubungan terjemahan dengan teks-teks lain seperti tafsir klasik, edisi terjemahan sebelumnya, dan dokumen kebijakan. Analisis ini bertujuan mengungkap bagaimana teks baru memelihara atau menantang warisan wacana terdahulu. Untuk menjamin keabsahan hasil, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai versi terjemahan, sedangkan triangulasi teori memadukan empat perspektif analitis: Feminist Translation Studies, Critical Discourse Analysis, Interseksionalitas, dan Maqāṣid al-Sharī'ah. Selain itu, penelitian ini menerapkan peer debriefing, yaitu diskusi hasil temuan dengan pakar studi Al-Qur'an, linguistik Arab, dan studi gender guna meminimalisasi bias interpretatif. Peneliti juga menerapkan reflektivitas, menyadari posisi subyektif sebagai peneliti Muslim yang berpihak pada prinsip keadilan gender. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi feminist standpoint epistemology (Harding, 1991) yang menekankan pentingnya kesadaran posisi peneliti dalam proses produksi pengetahuan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, keterbatasan linguistik, karena analisis semantik mendalam terhadap istilah klasik memerlukan verifikasi oleh ahli filologi Qur'anik. Kedua, keterbatasan akses terhadap proses internal Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, yang menyebabkan analisis praktik diskursif hanya didasarkan pada sumber publik. Ketiga, keterbatasan kuantitatif, karena penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak mengukur dampak sosial terjemahan secara statistik. Terakhir, keterbatasan sampel, karena fokus hanya pada empat ayat representatif yang membahas relasi gender, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi untuk keseluruhan Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjemahan Al-Qur'an edisi resmi Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) bukan sekadar aktivitas linguistik, melainkan tindakan ideologis yang berperan aktif dalam membentuk konstruksi sosial mengenai relasi gender dalam Islam. Analisis terhadap ayat-ayat kunci seperti QS 4:34, QS 2:228, QS 33:59, dan QS 24:31 mengungkap adanya pola penerjemahan yang konsisten memilih makna paling patriarkal dari kata-kata yang memiliki rentang semantik luas. Misalnya, kata *qawwāmūn* (QS 4:34) diterjemahkan sebagai *pemimpin*, padahal dalam leksikon Arab klasik memiliki makna alternatif seperti *pelindung* atau *penyokong*. Pemilihan makna tersebut menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan dan mengokohkan struktur hierarki dalam keluarga Muslim.²⁸ Demikian pula, kata *waḍribūhunna* diterjemahkan sebagai *pukullah mereka*, tanpa penjelasan linguistik atau kontekstual yang memadai, meskipun akar kata *ḍhoroba* dalam bahasa Arab mencakup lebih dari dua puluh makna, termasuk *meninggalkan* atau *menjauh*²⁹ (Ibn Manẓūr).

Kata *darajah* dalam QS 2:228 diterjemahkan sebagai *kelebihan*, padahal banyak mufasir awal seperti Ibn 'Abbās memahami istilah tersebut sebagai bentuk *tanggung jawab lebih besar*, bukan superioritas moral atau eksistensial. Sementara itu, terjemahan untuk *jilbāb* (QS 33:59) dan *zīnah* (QS 24:31) menampilkan kecenderungan memperluas makna kultural menjadi regulasi moral yang kaku terhadap tubuh perempuan. Diantara beberapa ulama klasik memiliki pandangan yang berbeda bahwa ulama klasik seperti al-ṭabarī (w. 310 h) dalam *Jāmi' al-Bayān* menafsirkan *jilbāb* sebagai pakaian luar yang menutupi tubuh perempuan agar tidak tampak bentuk (lekuk) tubuhnya dan untuk membedakannya dari budak Perempuan.³⁰ Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa bias gender dalam terjemahan Al-Qur'an Kemenag RI bukan hasil kebetulan linguistik, tetapi refleksi dari ideologi patriarkal yang dilembagakan. Proses penerjemahan di bawah otoritas negara menghasilkan representasi "Islam moderat" yang tetap konservatif dalam isu gender.

Hubungan dengan Teori dan Kajian Terdahulu

²⁸ . Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

²⁹ . Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1993).

³⁰ . I-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, juz 22, hlm. 33 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992).

Temuan ini memperkuat pandangan para pemikir *Feminist Translation Studies* yang menegaskan bahwa penerjemahan tidak pernah netral secara ideologis.³¹ Sherry Simon dan Luise von Flotow menunjukkan bahwa bahasa memiliki kekuatan politik untuk mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan sosial, termasuk patriarki. Dalam konteks ini, penerjemahan teks suci berfungsi sebagai *arena ideologis* di mana makna-makna religius dikonstruksi sesuai dengan kepentingan politik dan sosial tertentu.³² Lawrence Venuti melalui konsep *invisibility of the translator* mengingatkan bahwa klaim terhadap transparansi dalam terjemahan justru menyembunyikan intervensi ideologis penerjemah.³³ Hal ini relevan dengan terjemahan Kemenag RI yang mengklaim netralitas dan kesetiaan terhadap teks sumber, namun secara ideologis menampilkan bias patriarkal yang sistematis.

Analisis ini juga beresonansi dengan teori André Lefevere mengenai “patronase” dalam praktik penerjemahan. Lefevere menegaskan bahwa penerjemahan adalah bentuk *rewriting* yang dikontrol oleh ideologi, poetika, dan patronase institusional.³⁴ Dalam konteks Indonesia, Kemenag RI berperan sebagai patron yang menentukan batas wacana Islam “resmi.” Oleh karena itu, keputusan penerjemahan mencerminkan bukan hanya preferensi linguistik, tetapi juga strategi politik negara dalam mengelola stabilitas sosial dan legitimasi keagamaan.

Kerangka *Critical Discourse Analysis* (Fairclough) membantu menjelaskan bagaimana pilihan linguistik berinteraksi dengan konteks sosial dan praktik kekuasaan.³⁵ Melalui tiga dimensi analisis—teks, praktik diskursif, dan praktik sosial—penelitian ini menelusuri keterkaitan antara bahasa, ideologi, dan relasi kuasa negara. Dalam hal ini, teks terjemahan Al-Qur’an menjadi produk diskursif yang menormalisasi dominasi laki-laki melalui representasi “pemimpin,” “kelebihan,” dan “pukullah.”

Pendekatan *interseksionalitas* (Crenshaw) menambah kedalaman analisis dengan memperlihatkan bahwa patriarki religius di Indonesia berkelindan dengan otoritarianisme negara dan konservatisme sosial.³⁶ Perempuan Muslim tidak hanya menghadapi penindasan berbasis

³¹ , von Flotow, Luise. “Feminist Translation Studies: Origins, Developments, Prospects.” *Target* 23,no. 2 (2011): 192–214.

³² . Simon, Sherry. *Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission*. London: Routledge, 1996.

³⁴ . Lefevere, André. *Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame*. London: Routledge, 1992.

³⁵ . Fairclough, Norman. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge, 2003.

³⁶ . Crenshaw, Kimberlé. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex.” *University of Chicago Legal Forum* 140 (1989): 139–167

gender, tetapi juga mengalami marginalisasi epistemologis dalam produksi makna keagamaan. Sementara itu, dari perspektif teologi Islam, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* (Auda) menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah keadilan dan kesejahteraan manusia.³⁷ Terjemahan yang menormalisasi kekerasan domestik atau subordinasi perempuan bertentangan dengan prinsip keadilan ini. Dengan demikian, tafsir feminis seperti Amina Wadud dan Laleh Bakhtiar³⁸ dapat dipahami sebagai upaya hermeneutis untuk mengembalikan teks Al-Qur'an pada semangat keadilan universalnya.³⁹

Relevansi terhadap Rumusan Masalah

Penelitian ini secara langsung menjawab rumusan masalah utama: bagaimana ideologi gender bekerja dalam terjemahan resmi Al-Qur'an dan bagaimana patronase negara memengaruhi pilihan interpretatif penerjemah. Melalui analisis komparatif antara terjemahan Kemenag RI dan terjemahan feminis (Wadud, Bakhtiar), ditemukan bahwa bias patriarkal terinternalisasi melalui tiga mekanisme utama: (1) pemilihan makna yang menguatkan hierarki gender, (2) absennya catatan kaki kontekstual yang menjelaskan keberagaman interpretasi, dan (3) monopoli negara atas otoritas penerjemahan.

Hasil ini menunjukkan bahwa proyek “moderasi beragama” yang dikampanyekan negara masih bersifat selektif. Moderasi diterapkan pada isu-isu politik horizontal (misalnya pluralisme antaragama), tetapi tidak menyentuh relasi vertikal antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai strategi stabilisasi politik, bukan sebagai komitmen moral terhadap keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Dari sisi epistemologis, penelitian ini juga menunjukkan ketimpangan dalam distribusi otoritas tafsir. Suara perempuan dan sarjana feminis Muslim tidak memiliki ruang institusional yang setara dalam proses penerjemahan resmi. Fenomena ini sejalan dengan konsep *epistemic injustice* dari Fricker, di mana perempuan mengalami *testimonial injustice* (pengetahuan mereka tidak dipercaya) dan *hermeneutical injustice* (ketiadaan sumber daya interpretatif untuk memahami pengalaman mereka sendiri).⁴⁰

Implikasi Sosial dan Kultural

³⁷ . Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008

³⁸ . Bakhtiar, Laleh. *The Sublime Quran*. Chicago: Kazi Publications, 2007.

³⁹ . Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

⁴⁰ . Fricker, Miranda. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford: Oxford University Press,

Terjemahan Al-Qur'an memiliki dampak langsung terhadap struktur sosial dan relasi gender dalam masyarakat. Pemahaman literal terhadap ayat-ayat seperti QS 4:34 sering digunakan untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Data Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa kekerasan domestik masih menjadi bentuk kekerasan tertinggi di Indonesia, dan dalam banyak kasus, pelaku menggunakan justifikasi religius berdasarkan interpretasi patriarkal ayat tersebut.

Selain itu, terjemahan yang menekankan kontrol terhadap tubuh perempuan, seperti dalam QS 33:59 dan QS 24:31, berkontribusi pada pembatasan partisipasi perempuan di ruang publik, dunia kerja, dan olahraga. Dalam konteks ini, bahasa terjemahan berfungsi sebagai instrumen sosial yang mengatur perilaku tubuh, moralitas, dan legitimasi kontrol patriarkal.

Implikasi Politik dan Institusional

Negara memainkan peran sentral dalam produksi wacana keagamaan. Dengan monopoli terhadap terjemahan resmi, Kemenag RI menciptakan hegemonisasi makna yang sulit digugat oleh tafsir alternatif. Hal ini memperkuat apa yang disebut Gayatri Spivak sebagai *epistemic violence*—penghapusan suara minoritas melalui kontrol atas narasi dominan. Keterlibatan perempuan dalam tim penerjemah, keterbukaan metodologis, dan publikasi prinsip hermeneutis adalah langkah konkret menuju demokratisasi otoritas tafsir. Selain itu, kebijakan “moderasi beragama” perlu diperluas agar mencakup keadilan gender sebagai dimensi moral dan sosial, bukan semata strategi politik.

Implikasi Akademik

Dari perspektif akademik, penelitian ini menegaskan urgensi pendekatan interdisipliner dalam studi Al-Qur'an kontemporer. Integrasi antara *Feminist Translation Studies*, *Critical Discourse Analysis*, dan teologi maqāṣid membuka ruang bagi pembacaan yang lebih etis dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya menantang dominasi tafsir patriarkal, tetapi juga menawarkan metodologi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan dalam bidang linguistik, studi agama, dan gender.

Penerjemahan Al-Qur'an bukan sekadar persoalan bahasa, melainkan persoalan kekuasaan. Ia menentukan siapa yang berbicara atas nama Tuhan, dan bagaimana suara itu diatur dalam struktur sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa negara, melalui otoritas penerjemahan, telah meneguhkan posisi patriarki dengan mengabaikan potensi egalitarian teks suci. Namun demikian, kehadiran tafsir feminis seperti Wadud dan Bakhtiar membuktikan bahwa pembacaan

yang adil dan inklusif terhadap Al-Qur'an tidak hanya mungkin, tetapi juga teologis sah. Pembacaan semacam ini merepresentasikan upaya hermeneutis untuk mengembalikan pesan Al-Qur'an pada prinsip universal keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, tugas keilmuan dan keagamaan kita bukan sekadar menerjemahkan teks, tetapi memastikan bahwa setiap terjemahan menjadi sarana pembebasan, bukan membenaran bagi ketimpangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerjemahan Al-Qur'an bukan semata persoalan linguistik, melainkan tindakan ideologis yang mencerminkan relasi kuasa dalam masyarakat. Analisis terhadap terjemahan Al-Qur'an edisi 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menunjukkan bahwa proyek "moderasi beragama" yang diusung pemerintah masih menyisakan bias patriarkal yang kuat dalam pilihan leksikal terhadap ayat-ayat tentang perempuan. Istilah seperti *qawwāmūn*, *wadribūhunna*, dan *darajah* diterjemahkan dengan makna yang menegaskan superioritas laki-laki, meskipun bukti leksikal dan tafsir klasik menunjukkan kemungkinan makna yang lebih egaliter.

Temuan ini memperlihatkan adanya selektivitas ideologis dalam kebijakan penerjemahan negara: moderat dalam isu-isu politik dan pluralisme agama, tetapi konservatif dalam isu kesetaraan gender. Dengan demikian, proyek penerjemahan resmi Al-Qur'an berfungsi sebagai instrumen reproduksi ideologi patriarki negara yang meneguhkan otoritas laki-laki atas tafsir keagamaan. Analisis ini memperkuat pandangan *Feminist Translation Studies* (Simon 1996; von Flotow 1997) bahwa penerjemahan selalu menjadi arena politik di mana bahasa digunakan untuk mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan.

Secara epistemologis, monopoli negara atas otoritas penerjemahan menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pengetahuan keagamaan, yang berujung pada *epistemic injustice* terhadap perempuan. Untuk itu, reformasi metodologis dan kelembagaan sangat diperlukan. Partisipasi ulama perempuan dalam tim penerjemah, keterbukaan prinsip hermeneutis, serta sistem multi-terjemahan yang mengakomodasi perspektif feminis menjadi langkah penting menuju keadilan epistemologis dalam wacana keagamaan di Indonesia.

Penelitian ini menyadari keterbatasannya, terutama pada jumlah ayat yang dianalisis dan pendekatan kualitatif yang tidak mengukur dampak sosial penerjemahan secara kuantitatif. Karena itu, studi lanjutan disarankan untuk memperluas analisis terhadap ayat-ayat lain dan

meneliti persepsi masyarakat terhadap hasil terjemahan. Meski demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap studi penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia dengan menunjukkan bahwa keadilan linguistik adalah prasyarat bagi keadilan sosial dan teologis dalam Islam kontemporer..

REFERENSI

- Abdul Kodir, Faqihuddin. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Al-Fairuzabadi, Muhammad ibn Ya'qub. 2005. *Al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad. 2006. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Thabari, Muhammad ibn Jarir. 2001. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Bakhtiar, Laleh. 2007. *The Sublime Quran*. Chicago: Kazi Publications.
- Barlas, Asma. 2002. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press.
- Cameron, Deborah. 1985. *Feminism and Linguistic Theory*. London: Macmillan.
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.
- Federspiel, Howard M. 1994. *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.
- Fairclough, Norman. 2003. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.
- Flotow, Luise von. 1997. *Translation and Gender: Translating in the Era of Feminism*. Manchester: St. Jerome Publishing.
- Gusmian, Islah. 2003. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju.
- Ibn Katsir, Ismail ibn Umar. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Riyadh: Dar Thayyibah.
- Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukarram. 1993. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Kementerian Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Komnas Perempuan. 2023. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Lefevere, André. 1992. *Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame*. London: Routledge.
- Marcoes-Natsir, Lies, dan Marzuki Wahid, eds. 2010. *Tafsir Al-Qur'an Wacana Gender*. Jakarta: Yayasan Rahima.

- Mernissi, Fatima. 1991. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Trans. Mary Jo Lakeland. New York: Basic Books.
- Rafiq, Ahmad. 2014. *The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community*. PhD diss., Temple University, Philadelphia, USA.
- Rifka Annisa Women's Crisis Center. 2020. *Laporan Penanganan Kasus Kekerasan Domestik*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Rofiah, Nur. 2020. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Kekerasan Berbasis Agama*. Jakarta: Rumah Kitab.
- Simon, Sherry. 1996. *Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission*. London: Routledge.
- Sponder, Dale. 1980. *Man Made Language*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1993. "The Politics of Translation." In *Outside in the Teaching Machine*, 179–200. New York: Routledge.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. ISBN: 978-602-438-859-5.
- Venuti, Lawrence. 2008. *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. 2nd ed. London: Routledge.
- Wadud, Amina. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. 2nd ed. New York: Oxford University Press.